

MEMBANGUN TEOLOGI ETNISITAS YANG INKLUSIF

YAHYA WIJAYA*

Abstract: Failure to manage ethnic diversity in a nation may result in a tragedy. Cases such as the holocaust and ethnic cleansing in ex Yugoslavia provide historical examples for such failure. The history of Indonesia records a series of anti-Chinese incidents that result in uneasy relationships between the ethnic Chinese and the rest of Indonesian society. The state's politics of discrimination contributed to the heightening of the anti-Chinese sentiment among the people. Recent changes in the government's policy in favour of the ethnic Chinese may be expected to improve the situation, but philosophical and religious references are needed to help the people transform their perspectives of ethnicity. A religious reference for building a better attitude toward ethnic diversity can be based on a Christian theology of ethnicity, drawn from the experience of the Israelites in the Old Testament, Jesus's resistance against the 'closed morality' of the Jews, and the concept of the family of God.

Keywords: ethnicity, racial discrimination, the ethnic-Chinese, plurality, closed morality, chosen people, family of God.

Etnisitas dan Kebangsaan

Etnisitas (*ethnicity*) pada umumnya dimengerti sebagai istilah yang menunjuk kepada kelompok orang-orang yang berbagi identitas budaya dan bahasa lisan¹. Etnisitas dapat menjadi unsur dari sebuah bangsa, akan tetapi bisa pula menembus batas kebangsaan. Misalnya, etnis Jawa merupakan salah satu unsur bangsa Indonesia, tetapi etnis Jawa juga terdapat di Suriname dalam jumlah yang cukup berarti dan ikut membentuk bangsa Suriname. Demikian pula etnis Tionghoa terdapat di hampir semua negara di dunia, dan menjadi salah satu unsur pembentuk dalam berbagai bangsa.

Dalam sejarah banyak negara, kesatuan pelbagai etnisitas tidak selalu berhasil dengan baik. Salah satu contoh mencolok pada jaman ini adalah bekas negara Yugoslavia yang gagal mempertahankan kesatuan pelbagai etnisitasnya, dan kemudian terpecahbelah menurut garis etnisitas, bahkan terjebak dalam konflik antar etnis yang sangat menyedihkan, sampai pada taraf apa yang dikenal sebagai '*ethnic cleansing*'.

Indonesia sendiri mempertahankan kesatuannya dengan susah payah. Kecuali ketika di bawah represi pemerintahan Orde Baru, upaya-upaya pemisahan diri yang mengandung unsur etnisitas selalu merupakan persoalan politik yang menyibukkan pemerintah yang berkuasa. Eksistensi Gerakan Aceh Merdeka dan gerakan serupa di Papua, misalnya, menunjukkan bahwa faktor etnisitas masih tetap menentukan dalam kehidupan sebuah bangsa yang multi-etnik. Bahkan jika pemisahan diri bukan merupakan persoalan, kesatuan antar etnisitas dalam suatu wilayah sering masih sulit diwujudkan, seperti tampak dalam kasus-kasus Maluku dan Kalimantan.

Masalah Etnisitas Keturunan Imigran

Persoalan etnisitas menjadi lebih signifikan lagi jika menyangkut kelompok etnik yang berasal dari luar wilayah geografis di mana negara terkait berada. Kelompok etnik keturunan imigran, yang biasanya merupakan minoritas ini, seringkali memiliki karakteristik tertentu yang berbeda secara cukup mencolok dari kelompok etnik yang dominan. Perbedaan ini bukan hanya tampak pada ciri-ciri fisik, tetapi juga pada ciri-ciri sosial, termasuk moralitas, agama, dan etos

* Dosen biasa pada Program Pascasarjana Fakultas Theologia Universitas Kristen Duta Wacana, mengajar bidang etika sosial dan etika profesional.

kerja. Perbedaan yang mencolok ini seringkali dijadikan alasan bagi kelompok yang dominan untuk mendiskriminasi kaum keturunan imigran. Diskriminasi terhadap kaum keturunan imigran bisa berbentuk tindakan yang sangat di luar perikemanusiaan, seperti dalam peristiwa ‘*Holocaust*’, di mana jutaan orang Yahudi di Jerman menjadi korban kekejaman Nazi.

Di Indonesia, kelompok etnik keturunan imigran yang paling kontroversial adalah orang Tionghoa. Bahkan istilah apa yang patut dipakai untuk menyebut mereka (Cina, Tionghoa, China, Chinese, Cina-Indonesia, Indonesia-Cina, atau etnik Cina) pun menjadi kontroversi. Sepanjang sejarah Indonesia, kerusuhan yang menargetkan etnik Tionghoa terus berulang. Di bawah kekuasaan VOC, dilancarkan tindakan anti etnik Tionghoa yang memakan korban sekitar 10.000 nyawa pada tahun 1740. Masih di masa kolonial Belanda, kerusuhan anti etnik Tionghoa yang memakan korban nyawa juga terjadi di Solo (1912) dan Kudus (1918). Peristiwa serupa juga terjadi di awal masa pendudukan Jepang, dan terus berulang berkali-kali di jaman Indonesia merdeka. Kejadian terakhir yang mengundang reaksi keras dunia adalah Peristiwa Mei 1998, yang diperkirakan di Jakarta saja memakan korban jiwa lebih dari 1200 orang termasuk orang-orang dari pelbagai etnisitas yang terperangkap dalam gedung-gedung yang dibakar, dan korban perkosaan sebanyak 180 perempuan etnik Tionghoa².

Banyak alasan dapat dikemukakan untuk membenarkan sikap rasial terhadap kelompok etnik keturunan imigran. Di antaranya adalah kurang sensitifnya mereka terhadap situasi budaya dan ekonomik kelompok mayoritas. Etnik Tionghoa sering dituduh eksklusif, materialistis dan kurang sopan (karena tidak menguasai bahasa Jawa halus, misalnya). Kebanyakan tuduhan semacam itu tidak didasarkan pada penelitian yang cermat, dan lebih merupakan *stereotype* yang terbentuk akibat ketidaksiapan menerima ciri-ciri fisik dan sosial yang berbeda dari kelompok keturunan imigran itu.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sikap diskriminatif juga terdapat pada banyak orang dari kelompok etnik keturunan imigran itu sendiri. Sebuah wilayah di kota Oldham, Inggris Utara, di mana orang Pakistan cukup banyak, dikenal sebagai ‘*no go area*’ bagi orang kulit putih, mirip dengan wilayah Harlem di New York City, yang kebanyakan penduduknya berkulit hitam. Perusahaan-perusahaan milik orang keturunan Tionghoa di mana-mana dikenal kurang memberi kepercayaan kepada para profesionalnya yang berasal dari etnisitas lain. Lagi, banyak alasan seringkali dikemukakan untuk membenarkan sikap diskriminatif itu, tetapi sama saja, alasan-alasan itu lebih banyak bersifat *stereotype* ketimbang objektif.

Mengatasi Masalah Perbedaan Etnisitas

Karena perbedaan etnisitas dirasa mengganggu kesatuan bangsa, hal ini seringkali mau diatasi dengan kebijakan politis. Di Indonesia, kehadiran etnik Tionghoa sudah lama dianggap masalah politis, sehingga dulu pemerintah merasa perlu membentuk lembaga semacam ‘Badan Koordinasi Masalah Cina’ dan membuat peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif baik secara eksplisit maupun implisit. Hal semacam itu dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah-pemerintah daerah (misalnya, di DIY, etnik Tionghoa tidak bisa mendapatkan sertifikat hak milik tanah). Belakangan memang para pemimpin nasional menyatakan penghapusan diskriminasi terhadap etnik Tionghoa, tetapi pernyataan-pernyataan itu tidak ditindaklanjuti dalam bentuk aturan yang operasional, sehingga pada kenyataannya perlakuan-perlakuan diskriminatif masih terjadi. Contohnya adalah soal SBKRI sebagai persyaratan untuk bermacam-macam urusan dengan instansi pemerintah. Maka diskriminasi rasial tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, tetapi juga secara institusional oleh pemerintah. Hasilnya tentu saja bukan penyelesaian tetapi justru meningkatnya perasaan diskriminatif dan rasial di dalam masyarakat.

Kebijakan politis lain yang cukup berpengaruh di masa lalu adalah apa yang dikenal sebagai politik asimilasi. Agar bisa diterima keberadaannya, etnik Tionghoa harus berasimilasi

ke dalam kelompok etnik yang dominan. Bentuk yang dianjurkan beragam, mulai dari perkawinan campur, Islamisasi hingga ganti nama. Intinya, bagaimana mengurangi sebanyak-banyaknya kalau tidak mungkin menyingkapkan ciri-ciri fisik atau sosial etnisitas Tionghoa. Tekanan sosial dan politis yang demikian hebat terhadap etnisitas Tionghoa di Indonesia ini membuat banyak orang dari kelompok etnik ini mengalami sindrom *minder* politis dan kultural. Keunikan budaya Tionghoa, yang di negara-negara Barat dianggap kekayaan tersendiri dan perlu dirawat dan layak dipasarkan –misalnya *China towns* yang cukup menonjol di hampir semua kota besar di Eropa dan Amerika, di Indonesia cenderung dilupakan dan dianggap warisan yang memalukan justru oleh banyak orang etnik Tionghoa sendiri. Pendeknya ada kecenderungan, yang berasal dari inisiatif politis dan kemudian mempengaruhi sikap mental sebagian etnik Tionghoa sendiri, untuk mengatasi persoalan perbedaan etnisitas dengan cara menyingkapkan atau menyangkali eksistensi etnisitas minoritas keturunan imigran ini. Tentu saja etnik Tionghoa generasi ke sekian yang lahir dan hidup di tanah Jawa atau negeri lain secara alamiah kehilangan banyak baik ciri-ciri fisik maupun sosial etniknya, dan cenderung mengadopsi banyak ciri-ciri sosial etnik yang dominan. Hal ini berbeda dengan proses yang dipaksakan untuk berlangsung secara instan karena tekanan politis.

Di pihak lain, tekanan sosial dan politis justru mendorong sebageian lain etnik Tionghoa untuk membentuk sikap mental isolasi, menjaga jarak dalam perjumpaan mereka dengan orang-orang dari etnisitas mayoritas. Sikap semacam ini pada akhirnya berkembang menjadi lingkaran setan yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang terdiri dari sentimen masa anti etnik Tionghoa – kebijakan politis diskriminatif terhadap etnik Tionghoa – sikap mental membentengi diri pada pihak etnik Tionghoa sendiri.

Di Barat, meskipun ketegangan antar etnisitas masih terjadi, upaya penghapusan etnisitas secara politis dan hukum tidak dapat diterima. Trauma *Holocaust* rupanya membuat bangsa-bangsa Barat lebih mampu menerima perbedaan etnisitas sebagai kenyataan yang tidak dapat dilenyapkan. Sejarawan Leeds University, Adrian Hastings, menunjukkan bukti-bukti bahwa peleburan etnisitas-etnisitas ke dalam sebuah bangsa tidak dapat mengakhiri eksistensi etnisitas-etnisitas itu. Karena itu upaya menghapuskan sebuah etnisitas hanya akan membawa bencana saja.³

Kesetiaan dan Kebanggaan terhadap Etnisitas

Diskriminasi terhadap etnisitas tertentu mungkin didorong oleh inisiatif politis, tetapi kebanyakan berakar pada kesetiaan dan kebanggaan yang berlebihan terhadap etnisitas sendiri. Orang Jawa merasa budayanya '*adiluhung*', dan etnik Tionghoa merasa moyangnya berasal dari pusat dunia. Orang-orang dari etnisitas mayoritas merasa kehadiran dan keberhasilan kaum keturunan pendatang mengancam kesejahteraan dan kebesaran kultural yang merupakan hak waris mereka. Etnik keturunan imigran merasa perlu melindungi komunitasnya dari serangan kultural dan politis kaum mayoritas.

Kebanggaan dan kesetiaan terhadap komunitas etnik sendiri sebenarnya baik dan alamiah. Mencintai etnisitas kita sendiri bahkan merupakan wujud yang realistis dari kasih terhadap sesama yang adalah nilai utama dalam iman Kristen. Seperti dikemukakan oleh Nigel Biggar,⁴ jika orang tidak dapat mengasihi 'saudara yang dekat', bagaimana ia dapat mengasihi 'saudara yang jauh'? Lebih lanjut Biggar mengatakan bahwa kesetiaan terhadap kelompok juga baik karena menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai etis tertentu. Sikap moral kita terbentuk oleh keterkaitan kita dengan komunitas di mana kita hidup.

Meskipun demikian, Biggar mengingatkan bahwa kesetiaan dan kebanggaan seperti itu mudah sekali untuk tercemar, sehingga menjadi kesombongan. Kesetiaan dan kebanggaan yang berlebih-lebihan terhadap kelompok kita dapat mengaburkan pandangan kita dalam melihat realitas. Kita tidak mampu lagi menilai kenyataan di luar kelompok kita secara objektif. Segala

sesuatu yang asing dan berbeda, kita abaikan atau kita nilai tidak beradab. Dengan demikian, kesetiaan dan kebanggaan etnik dapat membuat kita menjadi arogan, picik, dan ofensif.⁵

Umat Allah dan Masalah Etnisitas

Etnisitas merupakan aspek yang penting dalam narasi Alkitab. Karya keselamatan Allah diberitakan melalui kehidupan dan refleksi sebuah komunitas etnik, yaitu Israel. Keutuhan dan kemurnian komunitas etnik itu merupakan kondisi yang harus dipelihara untuk memungkinkannya menjadi tempat di mana bangsa itu membangun kehidupan iman dan moralnya semata-mata berdasarkan kasih setia Allah sebagaimana dialami di dalam sejarah komunitas tersebut. Upaya memelihara keutuhan dan kemurnian komunitas etnik itu pada masa itu dimengerti sebagai larangan untuk menyembah ilah-ilah lain, dan kadang-kadang hal itu berarti larangan juga untuk membaur melalui perkawinan dan perhelatan sosial dengan etnisitas-etnisitas yang lain. Meskipun demikian, umat yang memahami dirinya sebagai komunitas yang dikhususkan itu tidak diijinkan bersikap arogan dan sewenang-wenang terhadap etnisitas yang lain. Menarik bahwa narasi tentang sejarah komunitas itu mencakup pengalaman mereka bukan hanya sebagai kelompok minoritas di tengah-tengah mayoritas dari etnisitas lain, tetapi juga sebagai etnisitas mayoritas yang memiliki kaum minoritas di antara mereka. Sikap moral terhadap kaum minoritas dibangun dengan mengaitkan kedua pengalaman itu: 'karena kamu pun dahulu adalah orang asing...' (Ulangan 10:19).

Baik ketika menjadi minoritas etnik maupun sebagai mayoritas, umat Israel diajar untuk bergantung kepada kasih setia Tuhan saja. Kasih setia Tuhan tidak mengizinkan kaum mayoritas menindas komunitas minoritas, sehingga Israel dibebaskan dari cengkeraman Firaun, dan sesudah menjadi bangsa yang mapan diminta mengasihi orang asing yang hidup di tengah-tengah mereka. Di pihak lain, kaum minoritas yang bergantung pada kasih setia Tuhan juga diminta untuk menjadi berkat bagi masyarakat di mana mereka hidup tanpa harus menjadi *minder* dan kehilangan komitmen moral-kultural, seperti ketika Israel berada dalam pembuangan di Babel. Tokoh Daniel merupakan model peran yang ditampilkan untuk menggambarkan sikap yang tepat dalam posisi yang terakhir. Dengan kata lain, dalam menyikapi persoalan etnisitas, umat Allah diajar untuk mengembangkan kebajikan-kebajikan (*virtues*) yang merupakan kombinasi dari solidaritas dan integritas yang keduanya berakar pada kasih setia Allah.

Yesus dan 'Moralitas Tertutup'

Verne Fletcher memakai istilah 'moralitas tertutup' untuk 'suatu tata moral yang bermaksud memisahkan salah satu kelompok, aliran atau bangsa dari luar'⁶. Menurut Fletcher, dengan menutup pintu bagi mereka yang ada di luar, seseorang atau suatu kelompok sebenarnya mengurangi kebebasannya sendiri. Sikap semacam itu bertentangan dengan karakter Yesus yang menekankan kebebasan manusia dalam berhubungan dengan sesamanya.

Dalam uraiannya Fletcher menilai bahwa praktik keagamaan masyarakat di mana Yesus hidup, dengan hukum Taurat dan tradisi lisannya, berciri moralitas tertutup. Orang-orang dari etnisitas lain dan bahkan orang-orang Yahudi sendiri yang dianggap kurang sempurna dalam memenuhi syarat-syarat keagamaan ditempatkan di luar lingkungan komunitas suci. Artinya, mereka tidak berhak menikmati kebaikan, kesetiaan, dan keramah-tamahan orang-orang yang 'di dalam'. Moralitas tertutup membagi masyarakat menjadi '*insiders*' dan '*outsiders*', dan membatasi jangkauan kasih hanya bagi '*insiders*'. Moralitas ini menumbuhkan sikap masa bodoh atau bahkan memusuhi kepada mereka yang termasuk '*outsiders*'.

Bertentangan dengan moralitas tertutup yang dipraktikkan oleh komunitas tertutup, Yesus mengembangkan suatu 'komunitas terbuka' yang tampak dalam komposisi para

pengikutnya. Di antara kelompok inti 12 murid terdapat orang-orang yang latarbelakangnya sangat berbeda: pemungut cukai, pejuang Zealot, orang yang dekat dengan kalangan Imam besar dan para nelayan sederhana. Jika dilihat kelompok murid yang lebih luas, variasinya lebih banyak lagi, mencakup baik perempuan sederhana yang pernah dirasuk roh jahat maupun perempuan-perempuan kaya yang mendanai pelayanan Yesus, baik ketujuh puluh orang yang cukup sempat untuk mengelana memberitakan Injil maupun anggota-anggota Sanhedrin yang sibuk seperti Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Fletcher menggambarkan keterbukaan komunitas pengikut Yesus ini sebagai 'dipusatkan pada [Yesus] tetapi perbatasannya tidak digariskan'⁷.

Keterbukaan moralitas yang dikembangkan oleh Yesus juga tampak dalam pelayanan Yesus yang dapat dinikmati juga oleh orang-orang dari etnisitas lain. Orang Samaria, perempuan Siro-Fenisia, perempuan Kanaan, perwira di Kapernaum termasuk di antara mereka yang menikmati pelayanan penyembuhan yang dilakukan Yesus. Bahkan terhadap orang-orang asing yang menutup pintu terhadap dirinya, Yesus menegur murid-muridnya yang ingin menjatuhkan sanksi terhadap mereka (Luk 9:51-56). Semuanya ini merupakan gugatan terhadap sikap mental orang Yahudi yang memuliakan keunikan etnisitas sendiri dengan cara mengasingkan etnisitas lain.

Moralitas tertutup bukannya tidak mengembangkan kebajikan. Salah satu keunikan bangsa Yahudi di jaman Yesus justru adalah kebajikan-kebajikan luhur yang diungkapkan di dalam hukum dan ritual mereka. Masalahnya adalah bahwa kebajikan-kebajikan itu hanya berlaku di kalangan sendiri, sedangkan di luar kalangan itu bisa diambil sikap yang sama sekali lain. Moralitas tertutup adalah cara hidup dengan standar ganda: standar yang mulia untuk *the insiders* dan standar yang bisa bengis dan tak berperasaan untuk *the outsiders*. Sebenarnya kebajikan-kebajikan yang diajarkan Allah kepada umatnya cukup besar untuk dinikmati oleh semua orang, tetapi sikap mental yang berwawasan moralitas tertutup mengkorupsinya untuk kalangan yang sangat terbatas. Maka, meminjam kata-kata Fletcher, 'Yesus mempersoalkan kesetiakawanan yang kelewat sempit dan eksklusif'.⁸

Perlu diperhatikan pula bahwa Yesus bukan hanya melayani orang-orang dari etnisitas lain dengan baik, tetapi juga seringkali menampilkan mereka sebagai teladan. Ingat saja perumpamaan terkenal tentang orang Samaria yang baik hati, dan kata-kata pujian seperti 'iman sebesar ini tidak aku dapati di antara orang Israel' (Mat 8:10) dan 'Hai ibu, besar imanmu...' (Mat 15:28) yang dikatakan Yesus mengenai orang-orang asing yang datang kepadanya. Dengan cara begitu Yesus mengajak para pengikutnya untuk bukan hanya membuka diri tetapi juga mau belajar dari orang-orang yang sering dianggap *outsiders* yang kurang terhormat.

Moralitas tertutup memandang keunggulan kelompok lain dengan sikap curiga atau cemburu. Seperti kita ketahui, kecemburuan (sosial) kerap kali berada di balik aksi-aksi kerusuhan rasialis. Anehnya sikap cemburu seringkali dibenarkan, dan korban kerusuhan seringkali disalahkan karena membangkitkan rasa cemburu itu. Di satu pihak, benar bahwa memamerkan keberhasilan secara *overacting* patut disalahkan karena tidak sensitif dengan perasaan orang lain yang kurang beruntung. Tetapi, di pihak lain, apakah tidak ada sikap alternatif yang lebih baik ketimbang cemburu dan curiga dalam menanggapi keberhasilan orang lain? Dalam hal ini moralitas terbuka memungkinkan orang untuk mengambil sikap menghargai dan mau belajar.

Keluarga Allah

Etnisitas, bersama dengan keluarga dan klan, adalah salah satu batas alamiah yang memisahkan sekelompok orang dari kelompok-kelompok yang lain. Karena sifat alamiah dari etnisitas ini, diskriminasi dan favoritisme berdasarkan etnisitas sering dianggap sikap yang alamiah juga, dan karena itu dianggap normal.

Teologi Kristen, khususnya Protestan, memiliki pengalaman traumatis dengan pandangan yang menganggap bahwa kebenaran dapat ditemukan dalam segala sesuatu yang alamiah. Pandangan semacam itu telah membawa bangsa Jerman ke dalam jerat rasisme radikal dari kaum Nazi, sehingga Karl Barth, teolog besar abad 20, dengan tegas menolak konsep moral yang berdasarkan ‘*natural theology*’ karena dianggap berpotensi membenarkan diskriminasi alamiah⁹. Teologi Kristen menghargai alam dan melihatnya sebagai ciptaan Tuhan yang diciptakan dalam keadaan ‘sungguh amat baik’, dan karenanya menegaskan tanggungjawab manusia dalam memelihara alam. Meskipun demikian, teologi Kristen mengandung sikap yang tidak terlalu optimistik terhadap segala sesuatu yang alamiah. Dalam pemahaman Kristen, alam diciptakan Tuhan, tetapi jatuh dalam dosa. Akibatnya, kebersamaan atau pengelompokan alamiah juga tercemar oleh dosa. Itu sebabnya teologi Kristen mendasarkan kebersamaan manusia bukan semata-mata pada sifat alamiah. Salah satu dasar yang dipakai dalam teologi Kristen adalah apa yang digambarkan sebagai ‘keluarga Allah’.

Konsep teologis ‘keluarga Allah’¹⁰ menempatkan kita sebagai anak-anak Allah, anggota keluarga Allah. Namun keanggotaan kita dalam keluarga Allah bukanlah didasarkan pada ikatan alamiah, melainkan pada ‘perjanjian’ yang dipenuhi di dalam dan oleh Yesus Kristus. Kita menjadi anak-anak Allah karena kita menjadi bagian dari persekutuan tubuh Yesus. Di dalam persekutuan ini, ikatan-ikatan alamiah menjadi relatif. Ikatan-ikatan itu ditempatkan di bawah ikatan perjanjian yang berpusat pada kasih setia Allah. Itu sebabnya ketika menerangkan siapa orangtua dan saudara-saudaranya, Yesus menunjuk kepada ‘orang-orang yang melakukan kehendak Bapaku yang di sorga’ ketimbang kepada saudara-saudara dan orangtua alamiahnya (Mat 12:46-50). Paulus mengembangkan pandangan ini dalam Surat Galatia, di mana ia menolak mendasarkan persaudaraan pada asas keturunan alamiah dari Abraham. Seseorang adalah ‘keturunan Abraham’ karena di dalam Yesus Kristus ia tercakup di dalam perjanjian Allah yang disampaikan melalui Abraham, bukan karena kriteria biologis. Maka dalam persaudaraan ‘keturunan Abraham’, diskriminasi berdasarkan kriteria alamiah maupun sosial, termasuk etnisitas, gender dan status sosial, menjadi tidak relevan: ‘Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan...’ (Gal 3:28)

Teologi ‘Keluarga Allah’ menegaskan komitmen terhadap kebajikan-kebajikan tertentu, yaitu yang bersumber pada kasih setia Allah dan terwujud di dalam sikap dan karakter Yesus Kristus. Dalam Surat Galatia, kebajikan-kebajikan ini didaftarkan sebagai ‘buah Roh’, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, dst (Gal 5:22-23). Kebajikan-kebajikan itu merupakan orientasi dalam membangun kehidupan moral, yang menembus sekaligus mentransformasi orientasi-orientasi yang berdasarkan kesetiaan dan kebanggaan terhadap etnisitas.

¹ Adrian Hastings, *The Construction of Nationhood: Ethnicity, Religion and Nationalism*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, p.3.

² Uraian selengkapnya, lihat: Yahya Wijaya, *Business, Family and Religion: Public Theology in the Context of the Chinese-Indonesian Business Community*. Oxford: Peter Lang, 2002, p.27-55.

³ Adrian Hastings, *The Construction of Nationhood: Ethnicity, Religion and Nationalism*, p 180-181.

⁴ Nigel Biggar, *Good Life: Reflections on What We Value Today*. London:SPCK, 1997, p.73.

⁵ Nigel Biggar, *Good Life: Reflections on What We Value Today*. p.74.

⁶ Verne Fletcher, *Lihatlah Sang Manusia: Suatu Pendekatan pada Etika Kristen Dasar*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 1990, p.224.

⁷ Verne Fletcher, *Lihatlah Sang Manusia: Suatu Pendekatan pada Etika Kristen Dasar*. p.228.

⁸ Verne Fletcher, *Lihatlah Sang Manusia: Suatu Pendekatan pada Etika Kristen Dasar*. p.284.

⁹ Lihat Karl Barth, ‘No! Answer to Emil Bruner’ dalam Clifford Green ed., *Karl Barth: Theologian of Freedom*. Minneapolis: Fortress Press, 1991, pp. 151-167

¹⁰ Implikasi konsep ‘Keluarga Allah’ pada keluarga dan ikatan alamiah saya uraikan secara panjang lebar dalam Yahya Wijaya, *Business, Family and Religion: Public Theology in the Context of the Chinese-Indonesian Business Community*. pp.195-199.